

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

UPT Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara struktural unit kerja BPSPL Denpasar berada pada struktur eselon III A yang membawahi 1 sub bagian umum serta Kelompok Jabatan Fungsional. Balai Pengelolaan Kelautan(BPSPL) adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan Sumber Daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kelautan tanggal 17 November 2008.

BPSPL Denpasar diresmikan pada tanggal 27 Januari 2009 dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Sumber Daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya BPSPL Denpasar menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana program dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Sumber Daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Sumber Daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran Sumber Daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan;
- Pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode Tahunan Unaudited Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui aplikasi SAKTI yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi SAKTI ini diterapkan mulai tahun anggaran 2023 ini yang terdiri atas berbagai modul diantaranya Modul Admin, Modul Pembayaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap dan Modul GLP (General Ledger dan Pelaporan). Aplikasi SAKTI ini dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas yang merupakan hasil dari modul-modul yang lain yang secara langsung terintegrasi data-datanya sehingga menghasilkan laporan keuangan.

A.3. Basis Akuntansi

Satker Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan Sumber Daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar Sumber Daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto,

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk Sumber Daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan (*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas)
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian

Negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar Sumber Daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari

dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2018 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

*Perubahan
Penerapan
Metode
Penilaian ke
First In First
Out*

(11) Perubahan Penerapan Metode Penilaian Persediaan dari Harga Perkiraan Terakhir ke metode First In First Out (FIFO)

Sehubungan dengan penatausahaan serta akuntansi dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN) berupa persediaan, sejak penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual (tahun 2015) hingga tahun 2020, Pemerintah menggunakan metode HPT dalam menilai persediaan. Selanjutnya, berdasarkan kajian atas implementasi metode HPT selama ini, serta dalam rangka kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang mengatur bahwa persediaan dinilai menggunakan metode FIFO, Pemerintah akan menerapkan metode penilaian persediaan FIFO mulai tahun 2021. Sesuai PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, FIFO merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh Pemerintah dalam melakukan penilaian persediaan. Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Hal ini diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar yang antara lain mencakup: pemakaian; transfer keluar; hibah keluar; penyerahan kepada masyarakat/pemda; penggunaan barang pemeliharaan; pemakaian untuk tujuan strategis/berjaga-jaga; penyerahan dari belanja bantuan

sosial (bansos); barang rusak/usang; penghapusan lainnya; reklasifikasi keluar; koreksi keluar; serta penyesuaian hasil opname fisik dalam hal kuantitas berdasarkan opname fisik lebih kecil dibandingkan kuantitas berdasarkan pembukuan. Pada prinsipnya, prosedur pencatatan, jenis transaksi, serta jurnal yang dihasilkan dari Aplikasi Persediaan atau Aplikasi SAKTI sama dengan metode penilaian HPT. Namun demikian, hal-hal yang membedakan metode penilaian FIFO dari HPT antara lain:

- Metode penilaian FIFO tidak menimbulkan Koreksi Otomatis (KO) meskipun dalam satu periode (satu bulan) terdapat beberapa kali perolehan persediaan dengan harga satuan yang berbeda-beda. Dengan demikian, diharapkan saldo Pendapatan dan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan dapat diminimalkan.
- Transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk Persediaan dengan metode penilaian FIFO tidak menimbulkan selisih nilai, karena nilai transaksi Transfer Keluar tidak mengalami penyesuaian di akhir bulan sebagaimana terjadi pada metode penilaian HPT.

Penerapan Metode Penilaian FIFO pada Aplikasi Persediaan dan Aplikasi SAKTI Perubahan metode penilaian persediaan dari HPT menjadi FIFO diakomodasi Aplikasi Persediaan dan Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

- Saldo akhir persediaan dalam laporan keuangan tahun 2020 audited menjadi saldo awal persediaan tahun 2021.
- Harga perolehan terakhir persediaan pada tahun 2020 yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan saldo akhir persediaan tahun 2020 menjadi harga perolehan pertama pada tahun 2021 dengan metode FIFO.

Realisasi
Pendapatan Rp
3.229.263.151

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 3.229.263.151 atau mencapai 269,11 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.1.200.000.000. Pendapatan Kantor Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	PER 31 DESEMBER 2025		
	Estimasi	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1,200,000,000	14,892,132	1.24
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi		6,538,794	
Pendapatan Perizinan Lainnya		1,426,140,000	#DIV/0!
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya		1,759,502,645	#DIV/0!
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		14,099,594	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		1,032,000	
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		7,057,986	
Jumlah	1,200,000,000	3,229,263,151	269.11

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember TA 2025 mengalami kenaikan dibandingkan 31 Desember TA 2024. Hal ini disebabkan per 31 Desember Tahun 2025 terdapat kenaikan pada pendapatan negara bukan pajak berupa dari Kegiatan Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendiks CITES, penerimaan kembali atas belanja tahun anggaran yang lalu serta adanya pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah. Nilai pendapatan negara bukan pajak sejumlah Rp 3.229.263.151 dengan rincian sebagai berikut:

1. Akun 425122 sebesar Rp 14.892.132 merupakan pendapatan atas penjualan peralatan dan mesin.
2. Akun 425151 sebesar Rp 6.538.794 merupakan pendapatan atas penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi yaitu tarif sewa rumah negara 3 pegawai selama bulan Januari hingga Desember tahun 2025 dengan tarif Rp 363.687 dan Rp 155.325 tiap bulannya.
3. Akun 425629 sebesar Rp 1.759.502.645 merupakan pendapatan jasa kelautan atas pungutan perdagangan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dibatasi pemanfaatannya dan atau

dilarang ekspor (SIPJI).

4. Akun 425259 sebesar Rp 1.426.140.000 merupakan pendapatan perizinan lainnya atas rekomendasi pemanfaatan jenis yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dibatasi pemanfataanya dan atau dilarang ekspor (SAJI).
5. Akun 425911 sebesar Rp 1.032.000 merupakan pendapatan berupa penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu yang merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran dengan rincian uang makan PNS sebesar Rp 997.000 dan uang makan P3K sebesar Rp 35.000 tahun anggaran 2024.
6. Akun 425811 sebesar Rp 14.099.594 merupakan pendapatan berupa pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Rp 112.450 merupakan Denda Keterlambatan Pengadaan Sarpras Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut (Drone dan GPS)
 - ✓ Rp 90.000 merupakan Denda Keterlambatan Pengadaan Sarpras Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut (Proyektor dll)
 - ✓ Rp 363.500 merupakan Denda Keterlambatan Pengadaan Sarpras Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut (PC dan Drone)
 - ✓ Rp 4.000 merupakan Denda Keterlambatan Pengadaan Sarpras Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Alor (Alat Scan Barcode)
 - ✓ Rp 16.520 merupakan Denda Keterlambatan Pengadaan Sarpras Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Alor (Action Camera)
 - ✓ Rp 2.645.700 merupakan Denda Keterlambatan Pengadaan Sarpras Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Alor (GPS, Drone, Ecosounder)
 - ✓ Rp 1.016.000 merupakan Denda Keterlambatan Pengadaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut (Smart Tab dan Smartphone)
 - ✓ Rp 528.000 merupakan Denda Keterlambatan Pengadaan Peralatan Pendukung Penyelenggaraan Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (Peralatan selam scuba)
 - ✓ Rp 9.323.424 merupakan Denda Keterlambatan Pengadaan Sarpras Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Alor (Alat Pengukur Kualitas Air)

7. Akun 425912 sebesar Rp 7.057.986 merupakan pendapatan berupa penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Rp 469.400 merupakan kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam kegiatan Lautra
- ✓ Rp 5.000 merupakan kelebihan pembayaran biaya cetak poster
- ✓ Rp 20.000 merupakan kelebihan pembayaran perjalanan dinas
- ✓ Rp 6.500 merupakan kelebihan pembayaran belanja barang seragam celana pegawai
- ✓ Rp 111.268 merupakan kelebihan pembayaran belanja barang berupa pembelian tempat sampah
- ✓ Rp 556.491 merupakan kelebihan pembayaran perjalanan dinas (pembayaran transport BBM) dalam kegiatan lautra
- ✓ Rp 5.889.327 merupakan kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam kegiatan lautra

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Asin	14,892,132	-	#DIV/0!
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	6,538,794	6,390,720	
Pendapatan Perizinan Lainnya	1,426,140,000	1,222,695,000	16.64
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	1,759,502,645	1,798,911,256	
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	14,099,594		
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1,032,000	955,243	
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	7,057,986	6,099,758	15.71
Jumlah	3,229,263,151	3,035,051,977	6.40

*Realisasi Belanja
Negara
Rp.27.124.640.662*

B.2. Belanja

Realisasi Belanja pada Satker Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar per 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp 27.124.640.662 atau 87,34 % dari anggaran belanja sebesar Rp 31.055.932.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2025		
	ANGGARAN	REALISASI	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	8,019,517,000	7,401,629,623	92.30
Belanja Barang	15,784,061,000	12,977,586,171	82.22
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
Belanja Modal	7,252,354,000	6,745,424,868	93.01
Total Belanja Kotor	31,055,932,000	27,124,640,662	87.34
Pengembalian Belanja		-	
Jumlah	31,055,932,000	27,124,640,662	87.34

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025
berdasarkan sumber dana*

URAIAN SUMBER DANA KEGIATAN	PER 31 DESEMBER 2025		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Rupiah Murni	11,411,878,000	10,114,622,441	88.63
Pinjaman Luar Negeri	6,540,000,000	4,513,116,077	69.01
Penerimaan Negara Bukan Pajak	13,104,054,000	12,496,902,144	95.37
Jumlah	31,055,932,000	27,124,640,662	87.34

Dibandingkan dengan 31 Desember TA 2024, realisasi belanja Per 31 Desember TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 52,52 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya penambahan anggaran yang bersumber pada Pinjaman Luar negeri dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sehingga berdampak pada realisasi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2025	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	7,401,629,623	7,138,937,476	3.68
Belanja Barang	12,977,586,171	9,738,564,309	33.26
Belanja Modal	6,745,424,868	906,328,590	644.26
Jumlah	27,124,640,662	17,783,830,375	52.52

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp.7.401.629.623

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 7.401.629.623 dan Rp 7.138.937.476. Realisasi belanja Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 2,77

persen dibandingkan dengan dari 30 September 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya serta beberapa pegawai yang mengalami naik pangkat/golongan serta beberapa pegawai yang diangkat menjadi jabatan fungsional serta adanya tambahan 1 pegawai CPNS. BPSPL Denpasar terdiri dari 56 orang pegawai dengan rincian 47 orang PNS dan 3 orang P3K dan 6 orang pegawai PPNP atau kontrak.

Tahun anggaran 2025 terdapat pengembalian belanja pegawai berjumlah Rp 10.357.439 pengembalian ini melalui potongan SPM dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Rp 195.307 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan kinerja bulan Desember tahun 2024.
- ✓ Rp 400 merupakan pembulatan gaji (SPM 00097T)
- ✓ Rp 400 merupakan pembulatan gaji (SPM 00098T)
- ✓ Rp 46 merupakan pembulatan gaji (SPM 00192T)
- ✓ Rp 107 merupakan pembulatan gaji (SPM 00194T)
- ✓ Rp 979 merupakan pembulatan gaji (SPM 00195T)
- ✓ Rp 540.000 merupakan kelebihan pembayaran tunjangan struktural (SPM 00195T)
- ✓ Rp 4.440.000 merupakan kelebihan pembayaran tunjangan umum PNS (SPM 00097T)
- ✓ Rp 1.480.000 merupakan kelebihan pembayaran tunjangan umum PNS (SPM 00098T)
- ✓ Rp 2.220.000 merupakan kelebihan pembayaran tunjangan umum PNS (SPM 00099T)
- ✓ Rp 740.200 merupakan kelebihan pembayaran tunjangan umum PNS (SPM 00178T)

Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI TA PER 31 DESEMBER 2025	REALISASI TA PER 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6,727,649,997	6,651,020,410	1.15
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	516,224,184	332,219,373	55.39
Belanja Honorarium			#DIV/0!
Belanja Lembur	168,113,000	155,700,000	7.97
Belanja Vakasi	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	7,411,987,181	7,138,939,783	3.82
Pengembalian Belanja Pegawai	10,357,658	2,307	#####
Jumlah Belanja	7,401,629,523	7,138,937,476	3.68

Belanja Barang
Rp.12.977.586.171

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember TA 2025 dan Per 31 Desember TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 12.977.586.171 dan Rp. 9.738.564.309. Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 33,26 % dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2024. Hal ini disebabkan adanya penambahan anggaran yang bersumber pada Pinjaman Luar negeri dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sehingga berdampak pada realisasi anggaran belanja barang. Terdapat kenaikan belanja barang berupa belanja jasa (belanja sewa) yang signifikan disbanding tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun anggaran 2025 ini BPSPL Denpasar melakukan sewa gerai pelayanan selama 3 tahun kedepan di 8 lokasi (Denpasar, Sidoarjo, Mataram, Makassar, Gorontalo, Mamaju, Palu dan Kendari)

Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember TA 2025 dan Per 31 Desember TA 2024

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2025	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	581,757,848	816,021,076	(28.71)
Belanja Barang Non Operasional	391,671,605	799,030,472	(50.98)
Belanja Barang Persediaan	63,895,870	93,760,167	(31.85)
Belanja Jasa	7,794,533,604	2,010,483,122	287.69
Belanja Pemeliharaan	243,651,281	450,269,230	(45.89)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3,902,075,963	5,269,984,152	(25.96)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	299,021,590	(100.00)
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	12,977,586,171	9,738,569,809	33.26
Pengembalian Belanja	-	5,500	(100.00)
Jumlah Belanja	12,977,586,171	9,738,564,309	33.26

Pada tanggal 22 Desember 2025, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar telah mengajukan SPM Penampungan RPATA No 00436T tanggal 22 Desember 2025 atas pekerjaan yang belum terselesaikan hingga batas akhir pengajuan SPM LS Kontraktual yaitu Pengadaan Sarpras Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Alor berupa 3 (tiga) unit alat pengukur kualitas air yang dilaksanakan oleh penyedia barang yaitu PT. TRUNOJOYO MEDIKA PRIMA INDONESIA sesuai Surat Pesanan Nomor EP-01KAZDDT8V53NRK1273DPSC90N tanggal 27 November 2025 dengan nilai sebesar Rp. 517.968.000,-. Namun, pada tanggal 29 Desember 2025, penyedia menyampaikan surat ketidakanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan No.

020/SK/TMPI/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 dan hanya sanggup memenuhi 2 (dua) unit dari 3 (tiga) unit barang yang dipersyaratkan dalam Surat Pesanan dikarenakan adanya kendala dalam proses impor barang dan pemasukan barang ke Indonesia. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 3121/BPSPL.4/PL.450/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. 3122/BPSPL.4/PL.450/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025, hingga tanggal 29 Desember 2025, kemajuan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Sarpras Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Alor (Alat Pengukur Kualitas Air) adalah sebesar 66,67% (tidak tuntas terselesaikan) yaitu hanya 2 (dua) unit barang yang terealisasi dari 3 (tiga) unit barang yang harus dipenuhi, maka dilakukan pembayaran terhadap 2 (dua) unit barang yang telah diterima dalam kondisi baik dan sesuai melalui SPM Pembayaran RPATA No 00450T tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 345.312.000,- dan melakukan penihilan terhadap sisa saldo Penampungan RPATA sebesar Rp. 172.656.000,- melalui SPM Penihilan RPATA No 00451T tanggal 31 Desember 2025.

*Belanja Bantuan
Sosial Rp.0*

B.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember TA 2025 dan Per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Tidak terdapat alokasi belanja bantuan sosial pada BPSPL Denpasar.

*Belanja Modal
Tanah Rp.0*

B.6 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember TA 2025 tidak mengalami kenaikan dibandingkan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember TA 2024. Hal ini disebabkan karena tidak ada pembelian tanah dikantor BPSPL Denpasar pada TA. 2025 tidak mendapatkan alokasi belanja modal tanah

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp. 6.745.424.868*

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp. 6.745.424.868. Nilai realisasi belanja modal mengalami kenaikan sebesar 644,26 % bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember TA 2024. Hal ini disebabkan adanya belanja modal pada anggaran yang bersumber pada Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan

Negara Bukan Pajak. Barang-barang belanja modal yang terealisasi diantaranya berupa peralatan mesin yaitu mobil, peralatan selam, PC, laptop alat pengukur kualitas air, tablet, printer, scanner, proyektor, drone, ac, mikroskop digital, meja kursi kantor, video conference, kamera dll. Belanja Modal yang Realisasi belanja modal per 31 Desember 2025 sebesar Rp 6.745.424.868 atau sebesar 93,01 %.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2025		
	ANGGARAN	REALISASI	% Realisasi Anggaran
Belanja Modal	7,252,354,000	6,745,424,868	93.01
Total Belanja Kotor	7,252,354,000	6,745,424,868	93.01
Pengembalian Belanja		-	
Jumlah	7,252,354,000	6,745,424,868	93.01

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember TA 2025 dan Per 31 Desember TA 2024

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2025	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2024	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	6,745,424,868	906,328,590	644.26
Jumlah Belanja Kotor	6,745,424,868	906,328,590	644.26
Pengembalian		-	-
Jumlah Belanja	6,745,424,868	906,328,590	644.26

B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.0

BPSPL Denpasar TA 2025 tidak memiliki alokasi belanja modal penambahan nilai gedung dan bangunan.

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp.0

BPSPL Denpasar TA 2025 tidak memiliki alokasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

B.10 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya Rp.0

Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember TA 2025 tidak mengalami kenaikan dibandingkan Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2024. Hal ini disebabkan tidak ada pengadaan pembelian belanja modal lainnya.

B.11 DIPA Awal dan Revisi Anggaran

Pada DIPA Awal Tahun 2025 ini Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar memiliki anggaran Rp 20.627.700.000, DIPA Awal disahkan pada tanggal 2 Desember 2024. Dengan rincian sumber dana dari Rupiah Murni sebesar Rp 12.012.700.000, Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp 6.540.000.000 dan PNBPN sebesar Rp 2.075.000.000.

Pada Bulan Januari 2025 melakukan Revisi POK 1 yang didalamnya mengakomodir pergeseran anggaran antar jenis belanja untuk pelaksanaan kegiatan tanggal 2 Januari 2025 dan Revisi 2 DIPA 1 yang didalamnya mengakomodir buka blokir untuk pemutakhiran KPA tanggal 22 Januari 2025.

Pada Bulan Februari 2025 melakukan Revisi 3 DIPA 2 yang didalamnya mengakomodir efisiensi anggaran.

Pada bulan April 2025 melakukan revisi ke 4 yang merupakan revisi buka blokir A pada tanggal 10 April 2025 dan revisi ke 5 merupakan revisi DIPA yang memuat revisi Halaman III DIPA triwulan II tanggal 24 April 2025.

Pada bulan Juni 2025 Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar telah melakukan revisi ke 6 merupakan revisi yang memuat revisi buka blokir PNBPN tanggal 17 Juni 2025.

Pada bulan Juli 2025 Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar telah melakukan revisi ke 7 merupakan

Revisi DIPA yang memuat revisi Halaman III DIPA triwulan III tanggal 15 Juli 2025.

Pada bulan Agustus 2025 Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar telah melakukan revisi ke 8 merupakan tanggal 20 Agustus 2025. Serta pada tanggal 21 Agustus 2025 Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar telah melakukan revisi ke 9 merupakan revisi yang memuat revisi pemutakhiran KPA.

Pada bulan Oktober 2025 Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar telah melakukan revisi ke 10 merupakan revisi yang memuat revisi pemutakhiran KPA tanggal 6 Oktober, pada tanggal 30 Oktober dilakukan revisi yang memuat revisi Halaman III DIPA Triwulan III Tahun Anggaran 2025 serta pada tanggal 31 Oktober telah melakukan revisi ke 12 yang memuat revisi DIPA Penambahan PNBPN.

Pada bulan November 2025 Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar telah melakukan revisi ke 13 yang memuat revisi pemutakhiran KPA tanggal 10 November 2025 serta tanggal 13 November melakukan revisi ke 14 yang memuat revisi DIPA kewenangan Kanwil. Kemudian revisi ke 15 memuat revisi

relaksasi, revisi 16 dan 17 memuat revisi pemutakhiran KPA.

Pada bulan Desember Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar telah melakukan revisi ke 18 yang memuat revisi pemutakhiran KPA tanggal 9 Desember 2025, serta revisi ke 19 yang memuat revisi pemutakhiran KPA tanggal 12 Desember 2025 dan revisi ke 20 memuat revisi POK satker tanggal 31 Desember 2025.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.0

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24
Saldo UP RM	-	-
Saldo TUP PNBP	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp.0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

C.3 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka
(prepaid)
Rp.5.280.100.000

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing Rp 5.280.100.000 dan Rp.0.

Belanja dibayar di muka adalah pengeluaran

belanja pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih terdapat manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut. Beban dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut

:

No.	Uraian	Nilai
1	Jurnal Sewa Gerai Sewa Kantor Pelayanan Wilker Bali (Denpasar) selama 3 tahun Pada Satker BPSPL Denpasar Nilai Kontrak Rp 1.380.000.000 dari Desember 2025 sehingga 35/36* Rp 1.380.000.000 = Rp	1,341,666,667
2	(Sidoarjo) selama 3 tahun Pada Satker BPSPL Denpasar Nilai Kontrak Rp 675.000.000 dari Desember 2025 sehingga 35/36* Rp 675.000.000 = Rp656.250.000	656,250,000
3	Jurnal Sewa Gerai Sewa Kantor Pelayanan Wilker NTB (Mataram) selama 3 tahun Pada Satker BPSPL Denpasar Nilai Kontrak Rp 420.000.000 dari Desember 2025 sehingga 35/36* Rp 675.000.000 = Rp408.333.333	408,333,333
4	Jurnal Sewa Gerai Sewa Kantor Pelayanan Wilker Sulawesi Selatan (Makassar) selama 3 tahun Pada Satker BPSPL Denpasar Nilai Kontrak Rp 750.000.000 dari Desember 2025 sehingga 35/36* Rp 750.000.000 = Rp 729.166.667	729,166,667
5	Jurnal Sewa Gerai Sewa Kantor Pelayanan Wilker Sulawesi Tengah (Palu) selama 3 tahun Pada Satker BPSPL Denpasar Nilai Kontrak Rp 600.000.000 dari Desember 2025 sehingga 35/36* Rp 600.000.000 =	583,333,333
6	Jurnal Sewa Gerai Sewa Kantor Pelayanan Wilker Mamuju selama 3 tahun Pada Satker BPSPL Denpasar Nilai Kontrak Rp 489.000.000 dari Desember 2025 sehingga 35/36* Rp 600.000.000 = Rp 475.416.667	475,416,667
7	Jurnal Sewa Gerai Sewa Kantor Pelayanan Wilker Sulawesi Tenggara (Kendari) selama 3 tahun Pada Satker BPSPL Denpasar Nilai Kontrak Rp 696.960.000 dari Desember 2025 sehingga 35/36* Rp 696.960.000 = Rp 677.600.000	677,600,000
8	Jurnal Sewa Gerai Sewa Kantor Pelayanan Wilker Gorontalo selama 3 tahun Pada Satker BPSPL Denpasar Nilai Kontrak Rp 420.000.000 dari Desember 2025 sehingga 35/36* Rp 420.000.000 = Rp 408.333.333	408,333,333
	JUMLAH	5,280,100,000

Piutang Bukan Pajak
Rp. 5.829.050

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 5.829.050 dan Rp. 469.400. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Piutang Bukan Pajak	5,829,050	469,400
Jumlah	5,829,050	469,400

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 senilai Rp 5.829.050 merupakan rincian dari kelebihan pembayaran Uang Makan PNS Bulan Desember 2025 senilai Rp 5.267.400 dan kelebihan pembayaran Uang Makan PPPK Bulan Desember 2025 senilai Rp 561.650.

C.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

*Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Pendek
Rp. (29.145)*

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.(29.145) dan Rp (2.347). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

C.6 Persediaan

*Persediaan
Rp. 847.500*

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 847.500 berupa 8 rim kertas HVS A4 dan 12 lembar materai 10.000. Sisa saldo persediaan ini terdiri dari saldo awal Rp1.604.250 ditambah mutasi tambah sebesar Rp1.604,250 ditambah dengan seluruh mutasi masuk yang berasal dari pembelian sebesar Rp64.015.270. Adapun mutasi tambah berasal dari pembelian barang konsumsi untuk operasional BPSPL Denpasar, sedangkan mutasi kurang terjadi karena adanya pemakaian barang konsumsi operasional (habis pakai). Adapun pada tahun anggaran 2025 tidak terdapat alokasi anggaran untuk barang persediaan yang dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau Pemda sehingga sampai dengan periode laporan ini tidak terdapat transaksi persediaan yang berasal dari transaksi barang persediaan yang diserahkan atau dijual ke masyarakat.

Nilai perbandingan Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Barang Konsumsi	847,500	1,604,250
Jumlah	847,500	1,604,250

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp(0)

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(29.145) dan Rp (2.347). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

C.8 Tanah

Tanah
Rp.14.021.264.000

Nilai aset Tanah pada BPSPL Denpasar per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.021.264.000. Jumlah tersebut merupakan saldo awal tanah seluas 2.535m² dengan nilai sebesar Rp12.602.880.000 seluas 2.400m² berlokasi di Gianyar dan senilai 1.418.384.000 dengan total luas tanah sebesar 135m² berada di Sidoarjo. Pada periode ini tidak terdapat mutasi tambah ataupun mutasi kurang.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	2.400 m2	Jln. By. Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Pering, Gianyar-Bali	12,602,880,000
2	135 m2	Ruko Surya Inti Permata, Sidoarjo, Jawa Timur	1,418,384,000
TOTAL			14,021,264,000

C.9 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp. 11.212.894.286

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp11.212.894.286. Nilai saldo tersebut merupakan nilai saldo awal sebesar Rp5.788.386.868 ditambah dengan nilai transaksi tambah sebesar Rp7.055.325.868 yang berasal dari transaksi pembelian penggunaan dana PNPB dan penggunaan dana proyek LAUTRA dengan rincian sebagai berikut :

a. Penggunaan Anggaran LAUTRA

Pada tahun 2025 pada Satker BPSPL Denpasar terdapat transaksi belanja modal yang membentuk Barang Milik Negara yang berasal dari kegiatan Proyek LAUTRA sebesar Rp2.263.429.700 berupa pembelian komputer selam, GPS, AC Split, Microphone wireless, camera underwater, video conference, drone, genset, echosounder, water quality checker, PC Unit, printer, scanner, iceboard interactive dan alat selam. Pengadaan belanja modal tersebut bertujuan untuk menunjang kegiatan pengelolaan kawasan konservasi di Perairan Alor dan Sekitarnya. Adapun BMN yang berasal dari perolehan anggaran LAUTRA ini direncanakan akan lakukan pemindahtanganan BMN melalui mekanisme hibah BMN dari BPSPL Denpasar kepada UPTD Kawasan Konservasi Alor dan Sekitarnya guna optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan BMN.

b. Pada tahun 2025 pada Satker BPSPL Denpasar terdapat transaksi belanja modal yang membentuk Barang Milik Negara yang berasal dari penggunaan dana PNPB kegiatan Pelayanan Jenis Ikan sebesar Rp3.530.526.268 berupa pembelian kendaraan fungsional, LCD proyektor, meja dan kursi kerja, AC, microwave, televisi, camera, video conference, drone, telepon mobile, mikroskop, kandang hewan portable, laptop, tablet PC, printer, scanner, dan alat selam. Adapun pengadaan BMN tersebut diperuntukan untuk menunjang kegiatan pelayanan peredaran jenis ikan seperti kegiatan respon cepat penanganan mamalia, verifikasi stock jenis ikan dan penetapan kuota.

c. Pada tahun 2025 pada Satker BPSPL Denpasar terdapat transaksi belanja modal yang membentuk Barang Milik Negara yang berasal dari penggunaan dana PNPB kegiatan Pelayanan Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil sebesar Rp313.790.020 berupa pembelian portable power station, camera underwater, drone, laptop, printer, external hardisk dan alat selam. Adapun pengadaan BMN tersebut diperuntukan untuk menunjang kegiatan pelayanan pemanfaatan pulau-pulau kecil seperti kegiatan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dan verifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil.

d. Pada tahun 2025 pada Satker BPSPL Denpasar terdapat transaksi belanja modal yang membentuk Barang Milik Negara yang berasal dari penggunaan PNPB kegiatan pelayanan PRL sebesar Rp637.678.880 berupa pembelian laptop, printer, drone, telepon lapangan, proyektor dan tablet PC. Adapun

pengadaan BMN tersebut diperuntukan untuk menunjang kegiatan pelayanan menafaatkan pengelolaan ruang laut seperti kegiatan verifikasi teknis pemanfaatan ruang laut.

Selain dari transaksi pembelian, terdapat transaksi reklas masuk berupa transaksi perubahan kode barang. Adapun sampai dengan periode ini mutasi berkurang sebesar Rp1.630.818.450 yang merupakan penghentian penggunaan BMN dalam rangka pemindahtanganan BMN dan transaksi reklas keluar karena adanya perubahan kode barang.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2024	Rp5.788.386.868
Mutasi Tambah :	
- Pembelian	Rp6.745.424.868
- Transfer Masuk	Rp309.901.000
Mutasi Kurang	
- BMN di Hentikan Penggunaan	Rp1.320.917.450
- Transfer Keluar	Rp23.688.500
Saldo per 31 Desember 2025	Rp11.212.894.286
Akumulasi Penyusutan sd 30 Juni 2025	Rp (4.512.314.033)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp6.700.580.253

*Gedung dan Bangunan
Rp. 4.043.361.700*

C.10 Gedung dan Bangunan

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 4.043.361.700 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 12 unit dengan nilai sebesar Rp4.043.361.700. Berdasarkan nilai yang tersaji diatas, dapat dijelaskan kelompok barang tidak mengalami perubahan nilai karena tidka terdapat mutasi tambah ataupun mutasi keluar pada kelompok barang gedung dan bangunan. Adapun sampai dengan periode ini tidak terdapat mutasi tambah ataupun mutasi kurang pada kelompok Aset Gedung dan Bangunan.

Saldo nilai perolehan per 31 Desember 2024	4,043,361,700
Mutasi Bertambah	
Perolehan Lainnya Aset Eks BPPN Kemenkeu	-
Penambahan Nilai Gedung Bangunan	-
Mutasi kurang:	
Penghapusan BMN/Hibah	-
Saldo per 31 Desember 2025	4,043,361,700
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(588,726,785)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	3,454,634,915

Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp.302.116.000

C.11 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 302.116.000, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp 302.116.000. Adapun sampai dengan periode ini tidak terdapat mutasi tambah ataupun mutasi kurang pada kelompok Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	302,116,000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	302,116,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	302,116,000

Aset Tetap Lainnya
Rp.0

C.12 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya pada BPSPL Denpasar per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00, dan aset tetap lainnya tidak mengalami penyusutan.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp.0

C.13 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pada periode 31 Desember 2025 tidak terdapat transaksi kurang atau transaksi tambah konstruksi dalam pengerjaan.

Akumulasi Penyusutan
Rp.(5.403.156.818)

C.14 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp (5.403.156.818) dan Rp.(5.239.732.660). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	11.212.894.286	(4.512.314.033)	6.700.580.253
2	Gedung dan Bangunan	4.043.361.700	(588.726.785)	3.454.634.915
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	302.116.000	(302.116.000)	0
4	Aset Tetap YTDDOP		0	0
	Akumulasi Penyusutan	29.579.635.986	(5.403.156.818)	24.176.479.168

Aset Tak Berwujud Rp.0

C.15 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Balai Pengelolaan tidak terdapat saldo ATB. BPSPL Denpasar tidak memiliki aset tidak berwujud.

Aset Lain-Lain Rp.0

C.16 Aset Lain-Lain

Aset Lainnya terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah. Pada Satker BPSPL Denpasar sampai dengan periode 31 Desember 2025 tidak terdapat saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan

*Uang Muka dari KPPN
Rp.0*

C.17 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp 18.966.196*

C.18 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 18.966.196 dan Rp 18.288.017. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 18.966.196 terdiri atas

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Beban Pembayaran Telepon	8,536,198	Di bayarkan bulan Januari 2026
Beban Pembayaran Listrik	9,844,514	Di bayarkan bulan Januari 2026
Beban Pembayaran Air	585,484	Di bayarkan bulan Januari 2026
Total	18,966,196	

Ekuitas

Rp.29.444.260.377

C.19 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 29.444.260.377 dan Rp 18.899.179.194. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
PNBP
Rp.3.206.281.
033

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 3.206.281.033 dan Rp 3.027.996.976. Pendapatan penerimaan negara bukan pajak tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 5,89 persen dibanding dengan pendapatan penerimaan negara bukan pajak tahun 2024, hal ini disebabkan adanya kenaikan pendapatan perizinan lainnya dan pendapatan jasa kelautan dan perikanan lainnya di tahun 2025 serta adanya tambahan pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah. Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak periode hingga 31 Desember Tahun 2025 dan Tahun 2024 telah dijelaskan pada tabel dibawah.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024

URAIAN PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PER 31 DESEMBER TAHUN 2025	PER 31 DESEMBER TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tusi	6,538,794	6,390,720	2.32
Pendapatan Perizinan Lainnya	1,426,140,000	1,222,695,000	16.64
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	1,759,502,645		
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	14,099,594	1,798,911,256	(99.22)
Jumlah	3,206,281,033	3,027,996,976	5.89

Terdapat perbedaan pendapatan penerimaan negara bukan pajak pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional dikarenakan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penerimaan kembali berupa pendapatan penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp 14.892.132 dan penerimaan kembali berupa belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp 8.089.986 tidak termasuk dalam pendapatan dalam Laporan Operasional.

Rincian Perbedaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember Tahun 2025 pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional

URAIAN PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	LAPORAN OPERASIONAL
Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	14,892,132	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tusi	6,538,794	6,538,794
Pendapatan Perizinan Lainnya	1,426,140,000	1,426,140,000
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	1,759,502,645	1,759,502,645
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	8,089,986	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	14,099,594	14,099,594
Jumlah	3,229,263,151	3,206,281,033

Beban
Pegawai
Rp.7.395.800.
573

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.395.800.573 dan Rp. 7.139.892.719. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai per 31 Desember tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 3,67 persen dibanding dengan beban pegawai 31 Desember tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya beberapa pegawai yang mengalami kenaikan pangkat, tambahan 6 pegawai PPPK serta adanya tahun 2025 penambahan 1 pegawai CPNS.

Terdapat perbedaan belanja pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional sejumlah Rp 5.829.050. Angka tersebut merupakan pengembalian kelebihan pembayaran uang makan PNS dan PPPK bulan Desember 2025.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-25	31-Dec-24	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	2,318,745,120	2,307,744,500	0.48
Beban Pembulatan Gaji PNS	38,503	38,687	(0.48)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(2,051)	(2,307)	(11.10)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	128,250,172	118,795,220	7.96
Beban Tunj. Anak PNS	34,697,049	32,994,994	5.16
Beban Tunj. Struktural PNS	21,420,000	25,200,000	(15.00)
Beban Tunj. Fungsional PNS	383,240,000	238,120,000	60.94
Beban Tunj. PPh PNS	19,537,122	15,599,055	25.25
Beban Tunj. Beras PNS	107,181,600	105,443,520	1.65
Beban Uang Makan PNS	284,703,600	255,115,000	11.60
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(9,620,200)		
Beban Tunjangan Umum PNS	29,280,000	53,635,000	(45.41)
Beban Gaji Pokok PPPK	188,728,600	123,316,800	53.04
Beban Pembulatan Gaji PPPK	3,058	2,120	44.25
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	12,874,880	8,329,360	54.57
Beban Tunjangan Anak PPPK	2,382,760	1,665,872	43.03
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	20,020,000	18,940,000	5.70
Beban Tunjangan Beras PPPK	9,921,540	6,662,640	48.91
Beban Uang Makan PPPK	27,632,350	14,411,000	91.74
Beban Tunjangan Umum PPPK	3,330,000	0	#DIV/0!
Beban Uang Lembur	168,113,000	155,700,000	7.97
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	3,394,554,124	3,499,280,177	(2.99)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)PPPK	250,769,346	158,901,081	57.81
Jumlah	7,395,800,573	7,139,892,719	3.58

Beban
Persediaan
Rp.64.652.620

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 64.652.620 dan Rp 92.820.917. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan per 31 Desember tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 30,35 persen dibanding dengan beban persediaan 31 Desember tahun 2024, hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran sehingga satker melakukan penghematan dalam belanja persediaan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-25	31-Dec-24	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	64,652,620	92,820,917	(30.35)
Beban Persediaan Lainnya			#DIV/0!
Jumlah	64,652,620	92,820,917	(30.35)

Terdapat perbedaan belanja persediaan pada Laporan Realisasi Anggaran dan beban persediaan Laporan Operasional senilai Rp 756.750 dikarenakan selisih antara saldo awal tahun 2025 persediaan senilai Rp 1.604.250 dan saldo akhir tahun persediaan senilai Rp 847.500.

Rincian Perbedaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember Tahun 2025 pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional

	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	LAPORAN OPERASIONAL	SELISIH
Beban Persediaan	63,895,870	64,652,620	756,750
Jumlah	63,895,870		756,750

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.488.541.236 dan Rp. 3.631.481.118. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa barang konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Terjadi kenaikan beban barang dan jasa per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024 sebesar 3,94 persen hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran sehingga satker melakukan penghematan pada belanja barang dan jasa. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Des Tahun 2025	Per 31 Des Tahun 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	397,077,814	466,009,989	(14.79)
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	(5,500)	
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11,295,909	13,696,420	(17.53)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	109,920,000	93,912,000	17.05
Beban Barang Operasional Lainnya	63,464,125	242,402,667	(73.82)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	#DIV/0!
Beban Bahan	391,671,605	417,509,437	(6.19)
Beban Honor Output Kegiatan	0	216,604,000	(100.00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	29,077,832	(100.00)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	135,839,203	(100.00)
Beban Langganan Listrik	153,583,380	185,171,652	(17.06)
Beban Langganan Telepon	106,919,380	111,520,962	(4.13)
Beban Langganan Air	7,283,854	12,294,500	(40.76)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	0	#DIV/0!
Beban Sewa	774,267,580	679,975,500	13.87
Beban Jasa Profesi	58,900,000	297,530,582	(80.20)
Beban Jasa Lainnya	1,414,157,589	729,941,874	93.74
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	#DIV/0!
Jumlah	3,488,541,236	3,631,481,118	(3.94)

Terdapat selisih belanja barang dan jasa pada Laporan Realisasi Anggaran dan beban barang dan jasa pada Laporan Operasional dikarenakan adanya jurnal belanja dibayar dimuka akrual sewa gerai di 8 lokasi senilai Rp 5.280.100.000 dan pada rincian beban langganan air, telepon dan listrik terjadi selisih belanja dikarenakan selisih akrual langganan listrik, air dan telepon antara tahun 2025 dan 2024.

Rincian Perbedaan Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember Tahun 2025 pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional

URAIAN BEBAN BARANG DAN JASA	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	LAPORAN OPERASIONAL	selisih
Beban Keperluan Perkantoran	397,077,814	397,077,814	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11,295,909	11,295,909	-
Beban Honor Operasional Satker	109,920,000	109,920,000	-
Beban Barang Operasional Lainnya	63,464,125	63,464,125	-
Beban Bahan	391,671,605	391,671,605	-
Beban Langganan Listrik	154,136,738	153,583,380	553,358
Beban Langganan Telepon	105,489,827	106,919,380	(1,429,553)
Beban Langganan Air	7,481,870	7,283,854	198,016
Beban Sewa	6,054,367,580	774,267,580	5,280,100,000
Beban Jasa Profesi	58,900,000	58,900,000	-
Beban Jasa Lainnya	1,414,157,589	1,414,157,589	-
Jumlah	8,767,963,057	3,488,541,236	5,279,421,821

*Beban
Pemeliharaan
Rp
243.651.281*

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 243.651.281 dan Rp. 450.269.230. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 45,89 persen dibanding dengan beban pemeliharaan per 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran sehingga satker melakukan penghematan dalam belanja pemeliharaan. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER TAHUN 2025	PER 31 DESEMBER TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	101,160,272	248,906,926	(59.36)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	142,491,009	201,362,304	(29.24)
Jumlah	243,651,281	450,269,230	(45.89)

Tidak terdapat perbedaan nilai beban pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.3.902.545.
363

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.902.075.963 dan Rp 5.264.908.170. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER TAHUN 2025	PER 31 DESEMBER TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1,878,429,658	2,575,713,730	(27.07)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	143,716,757	166,609,000	(13.74)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	780,000	10,975,000	(92.89)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,879,618,948	2,511,610,440	(25.16)
Jumlah	3,902,545,363	5,264,908,170	(25.88)

Terdapat perbedaan nilai beban perjalanan dinas pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional pada beban perjalanan dinas sebesar Rp 469.400 merupakan pengembalian belanja pada akun perjalanan dinas paket meeting luar kota.

Rincian Perbedaan Beban Perjalanan Dinas Pajak Per 31 Desember Tahun 2025 pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional

	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	LAPORAN OPERASIONAL	SELISIH
Beban Perjalanan Dinas	3,902,075,963	3,902,545,363	469,400
Jumlah	3,902,075,963		469,400

D.7 Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat

Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp. 0

Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat Per 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 299.021.590. Pada tahun anggaran 2025 BPSPL Denpasar tidak terdapat beban barang yang diserahkan kepada masyarakat seperti tahun-tahun sebelumnya. Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Transaksi penyerahan kepada Masyarakat merupakan keluarnya persediaan dalam rangka :

- Pemberian Bantuan Pemerintah yang berujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Kelautan dan Perikanan;
- Penyerahan persediaan yang akan menjadi Aset Tetap/Lainnya pada Barang

Milik Negara (BMD) Pemerintah Daerah melalui dana Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan, dan sebagainya.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember Tahun 2025	Per 31 Desember Tahun 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Tanah Bangunan Untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat	0	299,021,590	(100.00)
Jumlah	0	299,021,590	(100.00)

Beban
Bantuan
Sosial Rp.0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp.
1.432.756.888

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.432.756.888 dan Rp 694.780.518. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Per 31 Desember Tahun 2025	Per 31 Desember Tahun 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,325,572,428	568,899,678	133.01
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	88,205,060	87,922,040	0.32
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	18,979,400	37,958,800	(50.00)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,432,756,888	694,780,518	106.22

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp
26.798

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Beban penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2025 sejumlah Rp (2.347) merupakan angka penyisihan dari temuan auditor tahun sebelumnya sejumlah Rp 469.400. sehingga jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.(2.347) dan Rp.0

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024

URAIAN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	Per 31 Desember Tahun 2025	Per 31 Desember Tahun 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	26,798	2,347	1,041.80
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	26,798	2,347	1,041.80

Beban Lain-lain
Rp.0

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12 Kegiatan Non Operasional

Surplus
/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.
(16.352.602)

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Per 31 Desember Tahun 2025 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp (16.352.602) dan Per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp 7.055.001. Terdapat nilai Rp (16.352.602) merupakan nilai pendapatan pelepasan aset sebesar Rp 14.892.132 dikurangi beban pelepasan aset senilai Rp 51.584.720 yang merupakan nilai buku atas Barang Milik Negara dalam kondisi rusak berat dan dalam proses usulan pemindahtanganan BMN melalui mekanisme penjualan.

Serta terdapat surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya sejumlah Rp 20.339.986 merupakan pengembalian belanja atas setoran satker BPSPL Denpasar berupa pengembalian kelebihan belanja barang sebesar Rp 7.057.986. Serta senilai Rp 1.032.000 yang pengembalian kelebihan belanja pegawai dan terdapat Pendapatan Perolehan Aset Lainnya senilai Rp 12.250.000 ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai koreksi ini berasal dari perbaikan pencatatan BMN yang semula terdetaikan sejumlah 1 NUP kemudian dikoreksi menjadi 2 NUP sesuai dengan kondisi fisik barangnya.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Surplus / Defisit Pelepasan Aset	(36,692,588)	0	#DIV/0!
Surplus / Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	#DIV/0!
Surplus / Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	20,339,986	7,055,001	188.31
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(16,352,602)	7,055,001	(331.79)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.
18.899.179.194

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.18.899.179.194 dan Rp. 18.899.866.636.

Defisit LO
Rp.
(13.338.046.328)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp (13.338.046.328) dan Rp. (14.538.124.632). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian
Nilai Aset
Rp.0

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp.0

E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk 31 Desember tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp 0.

Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp.0

E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukannya penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0

Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp
(12.250.000)

E.3.4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp (12.250.000) dan Rp 9.871.792. Nilai sebesar Rp (12.250.000) berasal dari koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai koreksi ini berasal dari perbaikan pencatatan BMN yang semula terdetaikan sejumlah 1 NUP kemudian dikoreksi menjadi 2 NUP sesuai dengan kondisi fisik barangnya.

Koreksi Lain -
Lain Rp.0

E.3.5. Koreksi Lain - Lain

Koreksi lain- lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 9.871.792. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar
Entitas
Rp.23.895.377.
511

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 23.895.377.511 dan Rp 14.757.565.398. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Transaksi antar entitas sebesar Rp 23.895.377.511 terdiri dari :

RINCIAN TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	Per 31 Desember Tahun 2025	Per 31 Desember Tahun 2024	NAIK (TURUN) %
Ditagihkan ke Entitas Lain	27,297,296,662	17,783,830,375	53.50
Diterima dari Entitas Lain	(3,401,919,151)	(3,035,051,977)	12.09
Transfer Masuk	-	8,787,000	(100.00)
Jumlah	23,895,377,511	14,757,565,398	61.92

Adapun rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL) / Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 27.297.296.662 sedangkan DDEL sebesar minus Rp 3.401.919.151

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN. Adapun transaksi transfer keluar sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0.

Ekuitas Akhir
Rp.29.444.260
.377

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 29.444.260.377 dan Rp. 18.899.179.194.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada bulan November tahun 2024 Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan arahan kebijakan efisiensi belanja perjalanan dinas. Melalui surat nomor S-1023/MK.02/2024, Menteri Keuangan menyampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan penghematan sebesar minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan hal tersebut satker diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada DIPA TA 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing satuan kerja. Satuan Kerja melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan. Berkoordinasi dengan unit eselon I Kementerian/Lembaga dalam melakukan revisi pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- ✓ BPSPL Denpasar pada tahun Anggaran 2025 terdapat kegiatan yang sumber anggarannya dari PHLN berupa kegiatan Oceans for Prosperity Project – Lautra sebesar Rp 6.540.000.000
- ✓ Terdapat jurnal balik atas jurnal Penyesuaian atas penyesuaian pada aplikasi SAKTI Modul GLP dikarenakan adanya belanja yang masih harus dibayar selama bulan Desember dan dibayarkan pada Tahun anggaran 2025 senilai Rp. 18.288.017 dengan rincian transaksi berasal dari :
 1. Rp 783.500 dari belanja barang yang masih dibayar berupa biaya langganan air
 2. Rp 10.397.872 dari belanja barang yang masih dibayar berupa langganan listrik
 3. Rp 7.106.645 dari belanja barang yang masih dibayar berupa langganan telepon

- ✓ Terdapat Jurnal Penyesuaian atas penyesuaian pada aplikasi SAKTI Modul GLP dikarenakan adanya belanja yang masih harus dibayar selama bulan Desember dan dibayarkan pada Tahun anggaran 2026 senilai Rp. 18.966.196 dengan rincian transaksi berasal dari :

1. Rp 585.484 dari belanja barang yang masih dibayar berupa biaya langganan air
2. Rp 9.844.514 dari belanja barang yang masih dibayar berupa langganan listrik
3. Rp 8.536.198 dari belanja barang yang masih dibayar berupa langganan telepon

- ✓ Pada Tahun Anggaran 2025 BPSPL telah menerapkan PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan serta telah memiliki 3 akun signifikan diantaranya :

1. Akun 111611 : Kas di Bendahara Pengeluaran

Transaksi yang dikendalikan dalam akun ini adalah pencatatan uang persediaan tunai, pencatatan penarikan dan pertanggungjawaban uang persediaan tunai, rekonsiliasi internal, pencatatan transaksi uang persediaan KKP, pelaporan kas di Bendahara Pengeluaran pada Laporan Keuangan serta pengungkapan kas di Bendahara Pengeluaran pada Catatan atas Laporan Keuangan. Resiko utamanya diantaranya adanya perbedaan pencatatan Uang Persediaan antara Pengelola Keuangan/Penanggungjawab Kegiatan dan BP, Adanya kesalahan pencatatan kodefikasi (KRO/RO/akun/ komponen/sub komponen/detail akun).

2. Akun 425259 : Pendapatan Perizinan Lainnya

Kegiatan transaksi yang dikendalikan dalam akun ini adalah pencatatan tagihan/billing pada Aplikasi SIMPONI, Pelaporan PNBPN terkait Pendapatan Perizinan Lainnya dan Pengungkapan Catatan Atas Laporan Keuangan. Resiko utamanya Adanya Kesalahan pencatatan nilai tagihan pada Aplikasi SIMPONI, Terdapat selisih nilai PNBPN antara Aplikasi SAKTI modul Bendahara dengan Modul GLP serta Adanya informasi yang kurang memadai terkait Pendapatan Perizinan Lainnya pada Catatan atas Laporan Keuangan

3. Akun 132111 : Peralatan dan Mesin

Kegiatan transaksi yang dikendalikan dalam akun ini adalah pencatatan barang Sesuai Berita Acara Serah Terima, pendetailan barang, pelaporan aset dan pengungkapan pada CaLK. Resiko utamanya diantaranya kode barang pada SAKTI modul komitmen berbeda dengan SAKTI modul aset, Perbedaan antara spesifikasi (jumlah dan jenis) barang yang diterima dengan dokumen kontrak, perbedaan antara saldo neraca aplikasi SAKTI modul GLP dengan modul aset tetap.

- ✓ Alokasi Anggaran Belanja Kantor Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar sebesar Rp **31.055.932.000** yang terdiri dari 3 (tiga) sumber dana yakni Rupiah Murni sebesar Rp 11.411.878.000, Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp 6.540.000.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 13.104.054.000. Untuk rincian anggaran belanjanya dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini.

No	Satker	Nama Satker	Sumber Dana	Periode	Belanja			Belanja			Belanja		
					Pegawai			Barang			Modal		
					Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	Rupiah Murni	12	8,019,517,000	7,401,629,623	92.30	3,392,361,000	2,712,992,818	79.97	0	0	0
2			Pinjaman Luar Negeri	12			-	3,945,269,000	2,249,686,377	57.02	2,594,731,000	2,263,429,700	87.23
3			Penerimaan Negara Bukan Pajak	12	-	-	-	8,446,431,000	8,014,906,976	94.89	4,657,623,000	4,481,995,168	96.23

- ✓ Hingga periode 31 Desember Tahun 2025 pada BPSPL Denpasar terdapat pagu blokir sebesar Rp 2.291.859.000 yang tersebar pada anggaran bersumber pada Rupiah Murni sebesar Rp 656.590.000 dan sumber dana Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp 1.635.269.000. Untuk rinciannya pagu dan blokirnya dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini.

DETAIL PAGU BLOKIR									
Periode : DESEMBER satker : 477419									
No	Satker	Nama Satker	Sumber Dana	Periode	Pagu	Realisasi	Presentase Realisasi	Jumlah Blokir	Sisa Dana
1	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	Rupiah Murni	12	11,411,878,000	10,114,622,441	88.63	656,590,000	640,665,559
2			Pinjaman Luar Negeri	12	6,540,000,000	4,513,116,077	69.01	1,635,269,000	391,614,923
3			Penerimaan Negara Bukan Pajak	12	13,104,054,000	12,496,902,144	95.37	-	607,151,856

- ✓ Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada satker Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar, Ditjen Pengelolaan Kelautan - Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu: Prioritas Nasional (PN) VI – Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dengan pagu mencapai Rp 8.548.820.000 dan sudah realisasi hingga Desember 2025 sebesar Rp 6.691.288.759 atau sebesar 78,27 persen rincian sebagaimana berikut :

REKAP PRIORITAS NASIONAL																	
periode : DESEMBER satker : 477419																	
No	Satker	Nama Satker	BAES1	Periode	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)				Prioritas Nasional (PN)		
								Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini	
													RVRO	PCRO (%)		RVRO	PCRO (%)
1	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	'03207	12	2362	REA004	Oceans for Prosperity Project - LAUTRA	6,540,000,000	4,685,772,077	71.6479	277,072	Hektar	277072	10	277072	100	PN
2				12	2365	PBW001	Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	200,000,000	197,265,788	98.6329	1	Rekomendasi / Kebijakan	0	10	0	100	PN
3				12	2366	PBT009	Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah	875,000,000	874,473,149	99.9398	1	Rekomendasi / Kebijakan	1	5	1	100	PN
4				12	2362	RAL001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem	313,820,000	313,790,020	99.9904	14	Unit	16	75	16	100	PN
5				12	2366	RAL001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	620,000,000	619,987,725	99.998	22	Unit	27	50	27	100	PN
								8,548,820,000	6,691,288,759	78.2715							

- ✓ Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 pada Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar pada Periode Tahun 2025 sebagai berikut:

**LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kementerian/Lembaga	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi	: Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Satuan Kerja	: Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
477419	2362 - QMA Data dan Informasi Konservasi Biota Peraliran	1,000,000,000	615,490,078	61.55	1	1	Dokumen	100	
	2362-RAL 001 Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi	313,820,000	313,790,020	99.99	14	16	Unit	100	
	2362-RAL 002 Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Biota Peraliran	3,699,303,000	3,523,866,268	95.26	71	91	Unit	100	
	2362- REA Oceans for Prosperity Project - Lautra	6,540,000,000	4,685,772,077	71.65	277,072	277,072	Hektar	100.00	
	2365- PBW Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	200,000,000	197,265,788	98.63	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100.00	
	2366 - PBT Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	875,000,000	874,473,149	99.94	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100.00	
	2366 - RAL Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	620,000,000	619,987,725	100.00	22	27	Unit	100.00	
	2362 - EBA 956 Layanan BMN	48,770,000	48,640,396	99.73	7	7	Layanan	100.00	
	2367 - EBA 958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	15,294,000	15,292,668	99.99	1	1	Layanan	100.00	
	2367 - EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	6,335,000	6,128,558	96.74	1	1	Layanan	100.00	
	2362 - EBA 962 Layanan Umum	81,009,000	80,533,882	99.41	1	1	Layanan	100.00	
	2367 - EBA994 Layanan Perkantoran	10,969,517,000	9,684,594,675	88.29	1	1	Layanan	100.00	
	2367 - EBC Layanan Manajemen SDM	65,355,000	64,950,193	99.38	50	50	Orang	100.00	
	2367 - EBD 952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	70,594,000	70,094,724	99.29	1	1	Dokumen	100.00	
	2367 - EBD 953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	49,991,000	49,974,522	99.97	1	1	Dokumen	100.00	
	2367 - EBD 955 Layanan Manajemen Keuangan	105,013,000	104,575,174	99.58	7	7	Dokumen	100.00	